



**KLIPING DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

14 – 15 Maret 2022



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

15 / 03 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	TANGGAL	Senin, 14 Maret 2022	+
	MEDIA	https://www.rumah.com/berita-properti/2022/3/204043/ini-dampak-setiap-rp1-triliun-yang-disalurkan-untuk-pembiayaan-perumahan	
	JUDUL	Ini Dampak Setiap Rp1 Triliun Yang Disalurkan Untuk Pembiayaan Perumahan	
	NARASUMBER	Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo	
	RESUME	Perusahaan BUMN PT SMF diamanatkan untuk memberikan porsi pembiayaan KPR FLPP mencapai 25 persen sehingga memperkecil dana yang disalurkan pemerintah dari 90 persen menjadi 75 persen. Ada dampak besar setiap Rp1 triliun dana yang disalurkan SMF untuk PDB hingga mendorong perekonomian nasional. Menurut Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo, PNM tahun 2021 ini telah direalisasikan untuk penyaluran dana KPR FLPP tahun 2021 lalu mencapai Rp1.295 miliar untuk 9.742 unit rumah yang mengindikasikan dana ini sebesar-besarnya digunakan untuk mendukung pembiayaan hunian kalangan MBR. Pembiayaan KPR FLPP ini merupakan kolaborasi SMF dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang pada tahun ini dialihkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). SMF menyediakan 25 persen dari porsi penyaluran KPR FLPP sementara 75 persennya disediakan oleh PPDPP.	
2	TANGGAL	Senin, 14 Maret 2022	+
	MEDIA	https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/zNAXQGwK-ambil-dana-pmn-smf-dorong-peningkatan-serapan-kpr-subsidi-untuk-mbr	
	JUDUL	Ambil Dana PMN, SMF Dorong Peningkatan Serapan KPR Subsidi untuk MBR	
	NARASUMBER	Sekretaris Perusahaan SMF Bonai Subiakto	



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

15 / 03 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

	RESUME	PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah mengalirkan dana pendamping untuk mendukung penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sepanjang 2021, yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,25 triliun. Sekretaris Perusahaan SMF Bonai Subiakto mengatakan seluruh dana tersebut di-blended dengan dana dari penerbitan surat utang. Seluruh dana itu digunakan untuk mendukung program KPR FLPP dalam memenuhi target subsidi pembiayaan KPR FLPP bagi 157.500 unit rumah pada 2021. Adapun porsi PPDPP (75 persen) yang sebesar Rp19,58 triliun, terdiri dari dana APBN sebesar Rp16,62 triliun dan pengembalian pokok sebesar Rp2,96 triliun. Porsi SMF sendiri sebesar 25 persen atau Rp4,62 triliun.	
3	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	Senin, 14 Maret 2022 https://www.liputan6.com/bisnis/read/4910726/smf-salurkan-kpr-bersubsidi-rp-225-triliun-sepanjang-2021 SMF Salurkan KPR Bersubsidi Rp 2,25 Triliun Sepanjang 2021 Sekretaris Perusahaan SMF Bonai Subiakto Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo Sepanjang tahun 2021, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), telah mengalirkan dana pendamping untuk mendukung penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp 2,25 triliun. Sekretaris Perusahaan SMF Bonai Subiakto menjelaskan PNM tersebut digunakan untuk mendukung program KPR FLPP dalam memenuhi target subsidi pembiayaan KPR FLPP bagi 157.500 unit rumah pada tahun 2021 bagi MBR. Program ini merupakan sinergi SMF dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian PUPR. Tahun lalu, SMF telah menyediakan 25 persen dari porsi penyaluran dana KPR FLPP, yakni Rp 4,62 triliun. Sedangkan sisanya disediakan BLU PPDPP yakni Rp 19,58 triliun, terdiri dari dana APBN sebesar Rp 16,62 triliun dan pengembalian pokok sebesar Rp 2,96 triliun. Sehingga total penyaluran dana KPR FLPP mencapai Rp 24,19 triliun untuk 178.828 unit rumah.	+



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

15 / 03 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

4	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	Senin, 14 Maret 2022 https://www.radarbangsa.com/news/37651/pt-smf-dorong-peningkatan-serapan-kpr-subsidi-untuk-mbr PT SMF Dorong Peningkatan Serapan KPR Subsidi untuk MBR Sekretaris Perusahaan SMF, Bonai Subiakto Salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah berhasil mengalirkan dana pendamping untuk mendukung penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp2,25 triliun. Menurut Sekretaris Perusahaan SMF, Bonai Subiakto program tersebut merupakan sinergi SMF dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian PUPR. SMF menyediakan 25% dari porsi penyaluran dana KPR FLPP, sedangkan 75% porsi sisanya disediakan oleh BLU PPDPP.	+
5	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	Selasa, 15 Maret 2022 https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/menilik-jeroan-ikn-ini-garis-besar-rencana-pembangunan-fasilitas-ikn/ar-AAV3ism?li=AAuZNMP Menilik Jeroan IKN: Ini Garis Besar Rencana Pembangunan Fasilitas IKN Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Pemindahan ibu kota negara disingkat <u>IKN</u> dari DKI Jakarta ke pulau Kalimantan Timur bukan lagi gagasan semata. Menurut Menteri <u>PUPR</u> Basuki Hadimuljono, pembangunan IKN akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2045. Pembangunan tersebut mengusung konsep Future Smart Forest City sehingga tetap memperhatikan konsep lingkungan. Tahapan pertama berlangsung mulai tahun 2022 hingga 2024. Pada tahap ini, kementerian PUPR berencana mengerjakan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di <u>Kalimantan Timur</u> itu seluas 6.671 hektar. KIPP terbagi dalam 3 klaster	+



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

15 / 03 / 2022

| Analisis Pemberitaan Media Online

	yaitu pemerintahan inti, pemerintahan pendidikan, dan pemerintahan kesehatan. Area yang akan dibangun hanya 24,5% (1.633 Ha) dari seluruh KIPP (6.671 Ha), selebihnya 75,5% (5.038 Ha) akan dimanfaatkan sebagai area hijau.	
--	--	--



14 / 03 / 2022

| Sumber: rumah.com

Ini Dampak Setiap Rp1 Triliun Yang Disalurkan Untuk Pembiayaan Perumahan

Author: Wahyu Ardiyanto

RumahCom – Perusahaan BUMN PT SMF diamanatkan untuk memberikan porsi pembiayaan KPR FLPP mencapai 25 persen sehingga memperkecil dana yang disalurkan pemerintah dari 90 persen menjadi 75 persen. Ada dampak besar setiap Rp1 triliun dana yang disalurkan SMF untuk PDB hingga mendorong perekonomian nasional.

Sepanjang tahun 2021 lalu, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero/SMF) berhasil menyalurkan dana pendamping untuk mendukung penyaluran KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dana ini merupakan penyertaan modal negara (PNM) yang diberikan kepada SMF sebesar Rp2,25 triliun tahun 2021.

Pemerintah terus mendorong ketersediaan akses perumahan yang layak dan terjangkau salah satunya dengan penyaluran PNM kepada SMF. Perumahan juga telah terbukti memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar khususnya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional dari 175 industri ikutannya.

Menurut Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo, PNM tahun 2021 ini telah direalisasikan untuk penyaluran dana KPR FLPP tahun 2021 lalu mencapai Rp1.295 miliar untuk 9.742

unit rumah yang mengindikasikan dana ini sebesar-besarnya digunakan untuk mendukung pembiayaan hunian kalangan MBR.

“Tentunya ini merupakan salah satu wujud dari kehadiran negara untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Dana PNM sebesar Rp2,5 triliun ini di-blended dengan dana dari penerbitan surat utang kemudian total dananya digunakan untuk program KPR FLPP untuk memenuhi target pembiayaan yang mencapai 157.500 unit tahun 2021 lalu,” katanya.

Pembiayaan KPR FLPP ini merupakan kolaborasi SMF dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang pada tahun ini dialihkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). SMF menyediakan 25 persen dari porsi penyaluran KPR FLPP sementara 75 persennya disediakan oleh PPDPP.

Pada tahun 2021, penyalurann KPR FLPP mencapai Rp24,19 triliun untuk membiayai 178.828 unit rumah. Porsi PPDPP (75 persen) sebesar Rp19,58 triliun yang merupakan dana APBN sebesar Rp16,62 triliun dan pengembalian pokok Rp2,96 triliun. Sementara itu porsi SMF yang 25 persen sebesar Rp4,62 triliun.

Dukungan dan kolaborasi SMF pada program perumahan ini merupakan wujud



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

14 / 03 / 2022

| Sumber: rumah.com

dan peran SMF sebagai *fiscal tools* Kementerian Keuangan dalam meringankan beban fiskal pemerintah dengan membiayai porsi 25 persen dari pendanaan KPR FLPP sehingga pemerintah hanya menyediakan porsi 75 persen dari sebelumnya 90 persen.

SMF juga menggandeng kerja sama dengan berbagai instansi seperti International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) LPPM Institut Pertanian Bogor (IPB) terkait peran dan fungsi SMF dalam mendukung peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan.

“Berdasarkan riset InterCAFE LPPM IPB ini, penyaluran pembiayaan perumahan yang menjadi andil SMF telah ikut berkontribusi terhadap kinerja makro ekonomi nasional. Hal ini karena setiap penyaluran dana Rp1 triliun dari SMF memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDB, mendorong penyerapan tenaga kerja, hingga peningkatan konsumsi rumah tangga mencapai Rp1,17 triliun,” jelasnya.

<https://www.rumah.com/berita-properti/2022/3/204043/ini-dampak-setiap-rp1-triliun-yang-disalurkan-untuk-pembiayaan-perumahan>



14 / 03 / 2022

Sumber: medcom.id

Ambil Dana PMN, SMF Dorong Peningkatan Serapan KPR Subsidi untuk MBR

Author: Husen Miftahudin

Jakarta: [PT Sarana Multigriya Finansial \(SMF\)](#) telah mengalirkan dana pendamping untuk mendukung penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sepanjang 2021, yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,25 triliun.

Sekretaris Perusahaan [SMF](#) Bonai Subiakto mengatakan seluruh dana tersebut di-blended dengan dana dari penerbitan surat utang. Seluruh dana itu digunakan untuk mendukung program KPR FLPP dalam memenuhi target subsidi pembiayaan KPR FLPP bagi 157.500 unit rumah pada 2021.

"Program ini merupakan sinergi [SMF](#) dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian PUPR," jelas Bonai, dalam keterangan resminya, Senin, 14 Maret 2022.

Bonai mengungkapkan, SMF menyediakan 25 persen dari porsi penyaluran dana KPR FLPP, sedangkan 75 persen porsi sisanya disediakan oleh BLU PPDPP. Pada 2021, penyaluran dana KPR FLPP mencapai Rp24,19 triliun untuk 178.828 unit rumah.

Adapun porsi PPDPP (75 persen) yang sebesar Rp19,58 triliun, terdiri dari dana APBN sebesar Rp16,62 triliun dan pengembalian pokok sebesar Rp2,96

triliun. Porsi SMF sendiri sebesar 25 persen atau Rp4,62 triliun.

"Dukungan dan kolaborasi pada program KPR FLPP merupakan wujud peran SMF sebagai fiscal tools Kementerian Keuangan dalam meringankan beban fiskal pemerintah dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP, sehingga pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP dari semula sebesar 90 persen," jelas Bonai.

Sementara itu, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo mengatakan bahwa realisasi penggunaan dana PMN Tahun 2021 pada SMF di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1.295 miliar untuk 9.742 unit rumah.

"Ini merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, dimana dana yang dialirkan untuk KPR subsidi ini berasal dari APBN yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia," tegas dia.

Heliantopo berharap dukungan SMF pada program KPR FLPP ini akan memberikan efek berlipat (multiplier effect) bagi sektor perumahan, sehingga dapat ikut menggerakkan 170 industri turunan lainnya di sektor perumahan.

"Dengan demikian, maka akan menciptakan penyerapan tenaga kerja,



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

14 / 03 / 2022

| Sumber: medcom.id

perbaikan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional," tutup Heliantopo.

<https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/zNAXQGwK-ambil-dana-pmn-smf-dorong-peningkatan-serapan-kpr-subsidi-untuk-mbr>



14 / 03 / 2022

Sumber: liputan6.com

SMF Salurkan KPR Bersubsidi Rp 2,25 Triliun Sepanjang 2021

Reporter: Anisyah Al Faqir

Liputan6.com, Jakarta Sepanjang tahun 2021, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), telah mengalirkan dana pendamping untuk mendukung penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (**KPR**) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp 2,25 triliun.

Sekretaris Perusahaan **SMF** Bonai Subiakto mengatakan modal tersebut diserahkan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PNM) yang berasal dari penerbitan surat utang.

“Seluruh dana tersebut di-blended dengan dana dari penerbitan surat utang,” kata Bonai seperti dikutip dari situs kemenkeu.go.id, Jakarta, Senin (14/3).

Bonai menjelaskan PNM tersebut digunakan untuk mendukung program KPR FLPP dalam memenuhi target subsidi pembiayaan KPR FLPP bagi 157.500 unit rumah pada tahun 2021 bagi MBR. Program ini merupakan sinergi SMF dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian PUPR.

Tahun lalu, SMF telah menyediakan 25 persen dari porsi penyaluran dana KPR FLPP, yakni Rp 4,62 triliun. Sedangkan sisanya disediakan BLU PPDPP yakni Rp 19,58 triliun, terdiri dari dana APBN sebesar Rp 16,62 triliun dan pengembalian pokok sebesar Rp 2,96 triliun. Sehingga

total penyaluran dana KPR FLPP mencapai Rp 24,19 triliun untuk 178.828 unit rumah.

Bonai mengatakan dukungan dan kolaborasi pada Program **KPR FLPP** merupakan wujud peran SMF sebagai fiscal tools Kementerian Keuangan dalam meringankan beban fiskal pemerintah dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP. Sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90 persen.

Realisasi Penggunaan Dana PNM

Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo mengatakan realisasi penggunaan dana PNM Tahun 2021 pada SMF di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1,29 triliun untuk 9.742 unit rumah.

Hal ini merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dimana dana yang dialirkan untuk KPR subsidi ini berasal dari APBN yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” terang Heliantopo .

Dia berharap dukungan SMF pada Program KPR FLPP ini juga akan memberikan efek berlipat (multiplier effect) bagi sektor perumahan.



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

14 / 03 / 2022

| Sumber: liputan6.com

Sehingga dapat ikut menggerakkan 170 industri turunan lainnya di sektor perumahan. Termasuk menciptakan penyerapan tenaga kerja, perbaikan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional(PEN).

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4910726/smf-salurkan-kpr-bersubsidi-rp-225-triliun-sepanjang-2021>



14 / 03 / 2022

| Sumber: radarbangsa.com

PT SMF Dorong Peningkatan Serapan KPR Subsidi untuk MBR

Author: M. Isa

[RADARBANGSA.COM](https://www.radarbangsa.com) - Salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah berhasil mengalirkan dana pendamping untuk mendukung penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp2,25 triliun.

“Seluruh dana tersebut di-blended dengan dana dari penerbitan surat utang, kemudian total dananya seluruhnya digunakan untuk mendukung program KPR FLPP dalam memenuhi target subsidi pembiayaan KPR FLPP bagi 157.500 unit rumah pada tahun 2021 bagi MBR,” kata Sekretaris Perusahaan SMF, Bonai Subiakto dalam keterangannya, Senin 14 Maret 2022.

Menurut Bonai, program tersebut merupakan sinergi SMF dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian PUPR. SMF menyediakan 25% dari porsi penyaluran dana KPR FLPP, sedangkan 75% porsi sisanya disediakan oleh BLU PPDPP.

“Pada tahun 2021, penyaluran dana KPR FLPP mencapai Rp24,19 triliun untuk 178.828 unit rumah. Porsi PPDPP (75%) sebesar Rp19,58 triliun, terdiri dari dana APBN sebesar Rp16,62 triliun dan pengembalian pokok sebesar Rp2,96 triliun. Porsi SMF sendiri sebesar 25% atau Rp4,62 triliun,” katanya.

Sementara itu, menurut Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo mengatakan bahwa realisasi penggunaan dana PNM Tahun 2021 pada SMF di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1.295 miliar untuk 9.742 unit rumah.

“Ini merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, dimana dana yang dialirkan untuk KPR subsidi ini berasal dari APBN yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” terang Heliantopo.

<https://www.radarbangsa.com/news/37651/pt-smf-dorong-peningkatan-serapan-kpr-subsidi-untuk-mbr>



15 / 03 / 2022

Sumber: msn.com

Menilik Jeroan IKN: Ini Garis Besar Rencana Pembangunan Fasilitas IKN

Author: Siti Nur Rahmawati

TEMPO.CO, Jakarta -Pemindahan ibu kota negara disingkat [IKN](#) dari DKI Jakarta ke pulau Kalimantan Timur bukan lagi gagasan semata.

Rencana tersebut memiliki dasar hukum yang jelas setelah Presiden [Jokowi](#) menandatangani UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IKN. Seperti apa fasilitas dan pembiayaan pembangunan yang direncanakan?

Fasilitas IKN Nusantara

Menurut Menteri [PUPR](#) Basuki Hadimuljono, sebagaimana dilansir dari laman www.pu.go.id, pembangunan IKN akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2045. Pembangunan tersebut mengusung konsep Future Smart Forest City sehingga tetap memperhatikan konsep lingkungan.

Tahapan pertama berlangsung mulai tahun 2022 hingga 2024. Pada tahap ini, kementerian PUPR berencana mengerjakan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di [Kalimantan Timur](#) itu seluas 6.671 hektar.

Presiden Jokowi berbincang dengan menteri di lokasi berkemah di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin, 14 Maret 2022. Foto: Laily Rachev/Biro Setpres

“KIPP terbagi dalam 3 klaster yaitu pemerintahan inti, pemerintahan pendidikan, dan pemerintahan kesehatan. Area yang akan dibangun hanya 24,5% (1.633 Ha) dari seluruh KIPP (6.671 Ha), selebihnya 75,5% (5.038 Ha) akan dimanfaatkan sebagai area hijau,” ujar Basuki.

Sebelum membangun infrastruktur prioritas, pemerintah akan mengupayakan revitalisasi dan reboisasi hutan terlebih dahulu.

Selanjutnya: Adapun infrastruktur prioritas yang dimaksud...

Adapun infrastruktur prioritas yang dimaksud antara lain Istana Kepresidenan, Masjid Negara, perkantoran Kementerian/Lembaga, penataan Kawasan Sumbu Kebangsaan dan Tripraja, hunian ASN, serta jalan akses dan jalan lingkungan tahap awal.

Papan peringatan jalur perlintasan satwa liar terpasang di sisi Jalan Samboja-Sepaku yang masuk ke dalam koridor satwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin, 14 Maret 2022. Pada koridor satwa IKN Nusantara direncanakan akan dibangun underpass dan flyover sebagai perlintasan satwa liar.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di IKN Nusantara, pemerintah juga berencana membangun beberapa



15 / 03 / 2022

Sumber: msn.com

bendungan, salah satunya Bendungan Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Biaya Pembangunan IKN

Melansir laman Indonesiabaik.id, estimasi ongkos pemindahan ibu kota negara adalah Rp 466 triliun. Berikut adalah empat skema pembiayaan pembangunan IKN yang direncanakan oleh Bappenas :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ditujukan untuk penyediaan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana Negara, bangunan strategis TNI/Polri, perumahan dinas ASN dan TNI/Polri, dan pengadaan lahan dan ruang terbuka hijau.
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ditujukan untuk penyediaan kebutuhan bandara dan pelabuhan.
3. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), ditujukan untuk

penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, museum, lembaga pemasyarakatan, gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pembangunan infrastruktur utama (selain yang telah tercakup dalam APBN), serta sarana dan prasarana penunjang

4. Swasta, ditujukan untuk penyediaan perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi, sarana kesehatan, MICE dan *sciencetech* park, serta pembangunan *shopping mall*.

Dari total estimasi biaya pembangunan IKN, sebanyak Rp 340 triliun direncanakan ditutup dari skema KPBU, Rp 30,6 triliun dianggarkan dari APBN, dan Rp 95 triliun dari swasta.

<https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/menilik-jeroan-ikn-ini-garis-besar-rencana-pembangunan-fasilitas-ikn/ar-AAV3ism?li=AAuZNMP>